

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Salah satu yang menjadi permasalahan pada setiap negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya kemiskinan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakmampuan masyarakat miskin dalam menghadapi perkembangan jaman globalisasi di saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka sangat mempengaruhi tujuan serta cita-cita nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2012:320).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. Sebagai contoh suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.

Masalah kemiskinan juga dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan sebuah negara. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

“permasalahan kemiskinan tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja, tetapi juga menjadi masalah global yang penting. Kemiskinan akan berdampak pada peningkatan pengangguran, rendahnya produktivitas, minimnya pendidikan, kurangnya pelayanan kesehatan serta meningkatnya kriminalitas” (<http://www.tempo> 01 November 2022).

Berdasarkan fenomena diatas masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius dan harus segera ditangani oleh pemerintah. Masalah kemiskinan pada dasarnya erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan yang ada saat ini menyebabkan banyak anak tidak mampu mengenyam pendidikan, tingginya kasus malnutrisi, berdampak buruk bagi ibu hamil, berkurangnya produktivitas dan daya tahan tubuh , gizi buruk balita, tingginya angka

kematian balita. Bahkan dalam kenyataannya rendahnya tingkat pendidikan sebuah rumah tangga sangat miskin menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Selain itu memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan, masyarakat juga merasa kesulitan dikarenakan biaya kesehatan saat ini sangatlah tinggi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya dalam masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program Keluarga Harapan (PKH).

“program keluarga harapan (PKH) adalah suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga. Karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk menyukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *world Bank*” (pedoman umum, 2008:62).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin (KM), jika memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program PKH ini merupakan program yang dibuat oleh

Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No. 31 KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007, yaitu PKH dibentuk dan berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk provinsi dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi, sedangkan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota (KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 NO. 31).

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia secara berkesinambungan. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tahap uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran dan pengaduan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

PKH terfokus pada dua komponen yang berkualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin pendidikan seseorang akan berjalan dengan baik. Dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Adapun faktor yang kita lihat bersama bahwa semua rakyat bisa menjalani pendidikan yang berkualitas. Lapisan masyarakat menengah ke bawah banyak yang tidak bisa menjalani pendidikan. Hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya. Banyak anak-anak 7-16 tahun yang putus sekolah dan memilih untuk mencari pekerjaan untuk menopang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan hidup ke depannya. Meskipun telah banyak strategi yang digunakan untuk meningkatkan akses sekolah, seperti Beasiswa Miskin, Bantuan Operasi Sekolah (BOS) akan tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia masih belum optimal khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga sangat miskin (RTSM).

PKH di bidang pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses pelayanan pendidikan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab dengan adanya bantuan program ini, anak-anak RTSM yang menjadi peserta PKH akan lebih mudah untuk mengakses pelayanan pendidikan yang tersedia. Dalam hal ini pemerintah akan

mengakses pelayanan atau bantuan swadaya program kerja harapan (PKH) kepada masyarakat yang miskin agar dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam peningkatan pelaksanaan implementasi program kerja harapan (PKH) oleh organisasi pemerintah di kantor Kelurahan Karangbesuki kecamatan Sukun Kota Malang. Dari berbagai bidang pekerjaan yang digeluti pelayanan program kerja harapan (PKH) jelas sekali menjadi permasalahan adalah menyangkut menanggulangi masyarakat miskin, lapisan masyarakat menengah ke bawah banyak yang tidak bisa menjalani pendidikan. Hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan sehingga mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah dan memilih untuk mencari pekerjaan untuk menopang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan hidup kedepannya.

uraian di atas dapat menjelaskan bahwa masih banyak berbagai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan implementasi program kerja harapan (PKH) pada kualitas pelayanan program kerja harapan di kantor Kelurahan Karangbesuki Kecamatan sukun Kota Malang, oleh karena itu pemerintah Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang perlu melakukan peningkatan pelaksanaan implementasi program kerja harapan (PKH) di kantor Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang diantaranya:

1. Rendahnya Akses Pelayanan Kualitas Pendidikan
2. Rendahnya Sumber Daya Masyarakat (SDM)
3. Rendahnya pemahaman Masyarakat Tentang Program Pemerintah.
4. Kurangnya Kesenambungan Lintas Sektor Atau antar Dinas

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kantor Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang”*

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan fenomena tersebut masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat di tetapkan pada tujuan penelitian sebagai berikut:

Mengetahui dan mendeskripsikan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian yang optimal pada hasil penelitian ada dua hal yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan (di bidang akademik)
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota malang dalam meningkatkan implementasi program kerja harapan (PKH)
 - b. Sebagai acuan bagi kelurahan Karangbesuki beserta masyarakat untuk meningkatkan implementasi program keluarga harapan (PKH)